

KARTELISASI POLITIK PILKADA LANGSUNG

Oleh

Airlangga Pribadi

Staf Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga
Associate Researcher Soegeng Sarjadi Syndicated

Pemilihan kepala daerah langsung yang akan segera diselenggarakan pada medio tahun ini merupakan momen politik yang amat menentukan. Tercatat pada bulan Juni ini akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah langsung di 170 daerah, yang akan disusul dengan pemilihan kepala daerah langsung di 70 daerah antara Juni tahun 2005 sampai Desember 2005. Sepertinya banyak harapan tertumpu pada prosesi Pilkada Langsung nanti, diantaranya adalah harapan bahwa salah satu bagian reformasi procedural politik ini dapat menjadi *panacea* terhadap berbagai kelemahan yang muncul sebagai akibat dari mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui perwakilan seperti yang selama ini diselenggarakan.

Ketika kekuasaan warga benar-benar dapat terealisasi melalui kesempatan warga untuk dapat memilih sendiri kepala daerah yang akan mengelola daerah mereka, maka setidaknya kondisi ini dapat membawa transformasi pada tiga agenda penting politik lokal, *Pertama*, momen politik ini berpotensi untuk meningkatkan akuntabilitas dari kepala daerah. *Kedua*, pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilakukan oleh rakyat akan memberikan peluang terhadap perbaikan pelayanan public yang lebih baik. *Ketiga*, proses mekanisme pertanggungjawaban langsung oleh kepala daerah kepada rakyat sebagai pemilih bukan kepada anggota legislative yang seringkali justru dapat menimbulkan distorsi politik.

Namun demikian bukan berarti bahwa pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan tahun 2005 ini secara otomatis dapat berjalan baik tanpa batu kerikil untuk mengubah wajah politik local menjadi lebih baik. Pada tingkatan praksis

politik, terdapat berbagai kendala kondisi politik yang akan dapat menghambat peran Pilkada Langsung ini untuk meningkatkan performa demokrasi di tingkatan local.

Kartelisasi Politik

Salah satu optimisme public yang muncul disekitar wacana pilkada langsung ini adalah asumsi bahwa pasar bebas politik yang terbentuk dari dibukanya peluang bagi warga untuk memilih kepala daerahnya sendiri ini akan memungkinkan bagi terpilihnya para kepala daerah pilihan rakyat yang akan mengemban aspirasi dari para warga. Namun demikian asumsi ini melupakan factor krusial bahwa pasar bebas politik tidak selalu bahkan seringkali berjalan tidak sempurna. Pada kenyataannya pasar politik sarat dengan variabel pengganggu yang dapat mengacaukan kompetisi sehat di pasar politik pilkada langsung nanti.

Ancaman kegagalan pasar politik dalam pilkada langsung nanti untuk menumbuhkan iklim kompetisi politik yang sehat dan representatif dimungkinkan oleh munculnya fenomena kartelisasi politik. Kartelisasi politik terjadi ketika kekuatan-kekuatan besar politik (parpol dan kandidat) dalam system politik demokrasi, dimana masing-masing actor tersebut memiliki kekuatan untuk menghalangi dan meminggirkan kekuatan-kekuatan politik baru untuk dapat memasuki ruang politik yang ada (Bartolini dan Mair 2001).

Dalam politik local kita, fenomena kartelisasi politik ini dapat muncul dalam berbagai macam bentuk. Kartelisasi politik dapat hadir dalam bentuk koalisi kekuatan-kekuatan partai politik besar, tindakan politik yang dilakukan oleh kandidat kepala daerah dengan memanfaatkan sumber daya birokrasi yang mereka miliki bagi tujuan kemenangan pemilihan, maupun kekuatan politik uang yang dimiliki oleh para kandidat yang memiliki dana kuat untuk membatasi akses pesaing lainnya menuju pasar politik.

Sebagai salah satu contoh indikasi kartelisasi politik ini muncul dari keinginan melakukan koalisi politik antara kekuatan PDI-P dan PKS dalam pemilihan Kepala Daerah Langsung yang akan dimulai di Surabaya. Kekuatan besar PDI-P di Surabaya (partai ini berhasil memasukkan 13 calon dalam fraksinya di Surabaya) sepertinya telah menjadi daya magnetis yang memikat Partai Keadilan Sejahtera untuk melirik PDI-P dalam arena pertarungan politik demokrasi local. Sementara di sisi lain PDI-P membutuhkan konstituen politik dari PKS yang dikenal memiliki tingkat soliditas yang tinggi. Terlepas dari kalkulasi politik dan kepentingan dari dua kekuatan politik tersebut. Kecenderungan ini dapat memperkecil kemungkinan munculnya figure alternative yang semestinya dapat diusung oleh kekuatan politik potensial PKS, karena dukungannya terhadap kekuatan besar PDI-P dengan tokoh populis yang ia calonkan

Pada intinya berbagai tindakan kartelisasi politik tersebut dilakukan untuk menghambat munculnya kekuatan politik dan kandidat politik baru maupun alternative untuk masuk dalam arena politik demokrasi. Alih-alih memberikan kontribusi positif bagi pengembangan demokrasi local, pemilihan kepala daerah langsung yang telah terdistorsi oleh praktek kartelisasi politik dapat berakibat buruk bagi performa demokrasi kita kedepan.

Setidaknya kartelisasi politik yang terjadi memberikan empat dampak negative bagi praktek politik lokal kita. *Pertama*, kartelisasi politik dapat mengganggu bahkan mematikan proses sirkulasi elite politik sebagai sesuatu yang amat krusial bagi kehidupan demokrasi kita. Ketika arena politik hanya diisi dan diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan politik besar dan lama yang memiliki akses kepada sumber-sumber politik (uang, birokrasi, relasi massa primordial) maka menjadi suatu

kesempatan yang hampir mustahil mengharapkan kemunculan elite politik baru dan alternative untuk dapat terpilih dalam proses politik.

Kedua, eksisnya kartelisasi politik dalam suatu pasar politik yang terdistorsi dapat menyebarkan dan memperkuat praktek-praktek politik negatif berupa *money politics*, pemanfaatan massa politik primordial, dan distorsi informasi yang dilakukan oleh elite-elite politik kelas kakap untuk memanipulasi preferensi politik publik. *Ketiga*, praktek kartelisasi politik yang berjalan dapat menghambat kesempatan bagi munculnya figure pemimpin baru pilihan public yang memiliki kapabilitas intelektual dan praktikal untuk mengelola daerah dan mengemban amanat warga daerah, ketika kesempatan untuk memasuki wilayah politik telah dipangkas oleh kekuatan-kekuatan besar elite politik yang ada. *Keempat*, fenomena kartelisasi politik yang berlangsung akan membatasi pilihan-pilihan kandidat pemimpin yang ada, sehingga kondisi ini akan membatasi preferensi yang ada bagi warga. Efek-efek negative dari fenomena kartelisasi politik tersebut tentunya dapat menyurutkan harapan bagi suatu proses perubahan ketika iklim politik yang lama dirasakan sudah semakin menjemukan.

Kesadaran Politik Rasional

Fenomena kartelisasi politik yang telah diuraikan diatas memang merupakan tantangan nyata bagi system politik demokrasi. Bahkan dalam negara yang telah membangun kelembagaan politik demokrasi yang mapan pun, kartelisasi politik masih menjadi hantu yang merongrong kehidupan demokrasi sehari-hari. Pasar politik yang terdistorsi oleh kartelisasi politik bukanlah sebuah kutukan yang tidak dapat diperbaiki dalam arena politik demokrasi.

Untuk itu diperlukan tindakan politik praksis dari setiap agensi politik untuk bersama-sama membangun arena demokrasi, sebagai tempat yang subur bagi persemaian bagi kehidupan politik yang sehat. Tempat bagi bergulirnya sirkulasi elite

politik yang mencerminkan aspirasi suara rakyat, juga tempat bagi tumbuh dan berkembangnya kekuasaan otentik warga didalam ruang politik local.

Melalui pendidikan politik warga yang berjalan secara simultan dan pembukaan ruang public yang bebas dan rasional, maka kesadaran politik rasional public perlahan-lahan dapat ditumbuhkan. Dalam hal ini berbagai hal dapat dilakukan untuk membangun kesadaran politik kolektif warga. Hal ini dapat dimulai dengan membangun kerjasama yang intens antara kekuatan masyarakat sipil, masyarakat politik, kekuatan-kekuatan akar rumput yang ada, dan tidak kalah pentingnya adalah peran media massa untuk membangun kesadaran politik rasional warga melalui pembukaan ruang public yang bebas dan rasional. Sehingga perhelatan demokrasi pilkada langsung nanti dapat mendorong proses demokrasi local kita menuju kearah yang lebih baik.